BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebutuhan dasar manusia terdiri dari tiga hal pokok yaitu Pangan (makan), Sandang (pakaian) dan Papan (tempat tinggal). Dari ketiga kebutuhan manusia tersebut kebutuhan akan papan (tempat tinggal) adalah kebutuhan yang membutuhkan biaya besar untuk memenuhinya dan setiap manusia tentunya berusaha agar bisa memenuhi kebutuhannya tersebut. Seiring bertambahnya populasi penduduk khususnya di Indonesia berdasarkan data kepadatan penduduk, hal tersebut berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal penduduk seperti data yang disajikan dalam table 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri, 2009-2020

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Pedesaan + Perkotaan
2009	69.42	88.71	79.36
2010	67.61	88.28	78.00
2011	69.95	88.32	79.22
2012	73.13	88.48	80.89
2013	70.76	89.31	80.08
2014	70.24	89.24	79.77

2015	73.87	91.44	82.63
2016	73.96	91.64	82.58
2017	70.92	89.44	79.61
2018	71.96	89.76	80.02
2019	71.85	90.533	80.07
2020	72.04	90.35	80.10

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS-RI)

Tabel 1.2
Bantuan Pembiayaan Perumahan 2015-2019

Tahun	**Jumlah (unit)**	**Nilai Kumulatif (unit)**
2015	89.841	89.841
2016	259.139	348.980
2017	461.663	810.643
2018	498.472	1.309.115
2019	412.992	1.722.037

Sumber: Laporan Kinerja Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2019

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa masyarakat cenderung berusaha untuk memiliki tempat tinggal milik sendiri baik dipedesaan maupun perkotaan meskipun pada setiap tahun nilainya kurang stabil. Selain itu, diketahui bahwa nilai pembiayaan perumahan yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya juga cenderung meningkat bahkan sejak tahun 2015 sampai 2019 total ada sebanyak 1.722.037 unit rumah yang telah terbangun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal setiap tahunnya juga meningkat.

Secara umum KPR yaitu fasilitas pembiayaan yang disediakan bank untuk nasbah guna keperlan pembelian rumah dari *developer* atau *non devloper*, baik untuk pembelian rumah baru atau bekas, siap huni

(*readystock*), belum jadi (*indent*), atau *take over*. Berbeda dengan KPR Konvensional Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) yakni pada penerapan prinsip-prinsip Syariah didalam pelaksanaan akadnya. Pada umumnya di Indonesia sendiri kredit pemilikan rumah (KPR/KPRS) bekerja sama dengan lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah. Dengan adanya produk kredit pemilikan rumah ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat untuk bisa memiliki rumah sendiri dengan tanpa beban karena biaya yang dikeluarkan cukup terjangkau dan sesuai dengan penghasilan masyarakat.

Penyelenggara produk kredit pemilikan Rumah di Indonesia sendiri cenderung didominasi kerjasama dengan lembaga keuangan bank yakni dengan bank-bank di Indonesia baik konvensional maupun syariah baik bank milik Negara atau BUMN maupun Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Berikut definisi Lembaga Keuangan yang dikemukakan oleh Kasmir:[2] "Lembaga Keuangan yaitu setiap lembaga yang berkecimpung dibidang keuangan yang menghimpun, menyalurkan atau keduanya, dari masyarakat yang memiliki dana lebih kepada masyarakat yang mengalami kekurangan dana" (dalam transaksi lembaga Keuangan syariah penyaluran dana disebut dengan istilah pembiayaan). Lembaga keuangan syariah (bank syariah) yang tidak menerapkan Bunga dalam kegiatanya terbukti tidak terpengaruh oleh

[2]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 9

adanya inflasi ekonomi, misalnya saja kasus krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997- 1998 yang mengakibatkan terjadinya inflasi besar-besaran yang berakibat runtuhnya banyak bank konvensional di Indonesia karena kegagalan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek / likuiditas tidak mempengaruhi Bank syariah yang ada, bahkan bank syariah menunjukkan keunggulannya pada masa itu dengan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik yang diikuti dengan semakin bertambahnya minat nasabah terhadap bank syariah yang pada saat itu PT. Bank Mualamat Indonesia adalah satu-satunya bank islam yang ada di Indonesia.[3]

Bank islam, seperti halnya dengan perbankan konvensional, bank syariah juga berguna sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghubungkan pihak yang memiliki uang / dana dengan pihak yang membutuhkan modal dalam skema pembiayaan dan beroperasi tanpa bunga dengan penerapan prinsip syariah didalamnya.[4] Seperti yang kita ketahui bahwa Penyelenggara pembiayaan kepemilikan rumah sendiri di Indonesia cenderung didominasi kerjasama dengan lembaga keuangan bank yakni dengan bank-bank di Indonesia baik konvensional maupun syariah baik bank milik Negara atau BUMN maupun Bank Pembangunan Daerah atau BPD dan salah satu bank yang menjadi penyelenggara Kredit pemilikan Rumah Syariah adalah Bank

---

[3] Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 34-36

[4] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hal. 51

Muamalat Indonesia yang menamai produk KPRnya dengan KPR iB Muamalat. KPR iB Muamalat yaitu produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan *(take-over)* KPR dari bank lain dengan Dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa).[5] dalam KPRS iB Muamalat Bank Muamalat Indonesia ini memiliki dua jenis Akad yaitu *Murabahah* dan *Musyarakah.*

Dalam pengalokasian pembiayaan, bank Muamalat harus siap menerima resiko yang akan terjadi, baik positif maupun negatif. Semakin besar penyaluran pembiayaan kepada nasabah, maka akan semakin besar pula resiko yang mungkin timbul. Resiko memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi bisa untuk diminimalisir. Kegagalan dalam pembiayaan (Kredit macet) merupakan resiko yang sering dihadapi oleh bank, dimana resiko ini akan berpengaruh pada kesehatan bank itu sendiri. Memang tidak mudah untuk memberikan pembiayaan kepada debitur, karena ada beberapa proses yang harus dilakukan seperti survey dan pengkajian yang matang dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan.Unsur-unsur pembiayaan merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan pada penyaluran pembiayaan. Sebelum mengambil keputusan pada penyaluran dana, kita perlu

[5]https://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-consumer/kpr-ib-muamalat, diakses pada Senin 1 Maret 2020

mengetahui semua proses pembiayaan mulai dari pengajuan hingga pelunasan. Pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah harus melalui proses analisis, yaitu menggunakan analisis kelayakan calon nasabah yakni analisis 5C *Character* (watak), *Capital* (modal), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).[6] Analisis ini yang digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan, karena analisis ini dianggap sebagai dasar pertimbangan dalam penyaluran dana.

Analisis pembiayaan perlu dilakukan untuk mencapai sasaran yang tepat serta untuk meminimalisir terjadinya resiko yang akan timbul karena pembiayaan tersebut. Selain itu, pembiayaan yang akan digunakan harus sesuai peraturan atau akad yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Artiningsih dalam penelitian yang berjudul Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta tahun 2016 Penilaian Prinsip 5C (*Character, Capability, Capital, Collateral, dan Condition of economy)* dalam analisis pembiayaan komersial dan konsumtif di BTN Syariah cabang Yogyakarta,[7] bahwa Analisis 5C mempunyai peranan sangat penting untuk menentukan keputusan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan dari

---

[6]Surya Margianto, *Penerapan Prinsip 5C dan Prosedur Pemberian Kredit pada PD BPR BKK Karangmalang Cabang Sidoharjo Sragen*, (Surakarta: Tugas Akhir tidak diterbitkan, 2011), hal. 3

[7] Yuli Artiningsih, *Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak diterbitkan, 2016)

calon debitur. BTN Syariah cabang Yogyakarta dalam menentukan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan lebih menekankan kepada unsure *Character, capacity,* dan *Collateral.* Penilaian *Character* menjadi jaminan bagi bank untuk melihat kepribadian yang menggambarkan watak dan sifat dari calon debitur. Kemudian peran *capacity* merupakan dasar penilaian bank atas lancar atau tidaknya calon debitur mengangsur pembiayaan karena terkait dengan likuiditas calon debitur. Sedangkan *collateral* adalah dijadikan antisispasi atas terjadinya pembiayaan yang bermasalah yang mungkin bisa terjadi. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Siska Prastyawati tahun 2015 yang berjudul Pelaksanaan Pemberian KPR BTN Sejahtera FLPP Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surabaya,[8] menunjukkan adanya Bank BTN Cabang Surabaya melakukan proses pemberian kredit KPR BTN Sejahtera FLPP dari awal permohonan kredit sampai dengan realisasi kredit dan juga melayani proses penutupan kredit. Dalam melakukan analisa kredit bank ini memperhatikan beberapa diantaranya: Aspek-aspek yang dinilai dalam analisis kredit yaitu aspek 5 C (*character, capital, capaity, collateral* dan *condition of economy)* dari calon debitur. BTN menggunakan perhitungan anuitas untuk menghitung angsuran kredit KPR BTN Sejahtera FLPP serta di tambah biaya lain-lain seperti biaya provisi, notaris, administrasi appraisal, APHT, pengendapan tabungan minimal, dan biaya

[8]Siska Prastyawati, *Pelaksanaan PemberianKPR BTN Sejahtera FLPP pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surabaya,* (Surabaya: Rangkuman Tugas Akhir, 2015)

ansuransi. Permasalahan yang dihadapi BTN dalam memberikan KPR BTN Sejahtera FLPP yaitu data nasabah yang tidak lengkap persaingan dalam pemberian kredit KPR BTN Sejahtera FLPP, Angsuran menunggak, dan Kredit macet.

Dari dua penelitian tersebut melihat bahwa dalam pemberian KPRS bank BTN Syariah Cabang Yogyakarta dari prinsip 5C hanya 3 prinsip yang ditekankan yaitu, *Character, capacity,* dan *Collateral.* Dan masih ada beberapa kendala dalam pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank-bank besar milik BUMN yakni seperti adanya data fiktif dari nasabah dan data yang kurang lengkap, padahal dalam peraturan pemberian kredit sudah ditetapkan prosedur analisis kredit yaitu 5C. Pengambilan keputusan pembiayaan yang baik juga akan mempengaruhi kesehatan bank, karena bank juga akan menerima bagi hasil dari pembiayaan tersebut, sehingga akan meningkatan laba Bank. Prosedur pembiayaan menggunakan prinsip 5C dikatakan berperan apabila permbiayaan yang diberikan kepada nasabah kembali tepat waktu dengan sejumlah bagi hasil yang disepakati. Dengan demikian maka pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak mengandung resiko pembiayaan bermasalah. Dari Fakta yang ada menunjukkan bahwa masih ada atau terjadi kekurangan dalam sistem analisis pemberian kredit, sehingga disini peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian guna menganalisis bagaimana sistem dan prosedur pemberian

pembiayaan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) dengan berbagai akad-akad yang ada didalamnya pada bank syariah pertama di Indonesia yang memiliki dua akad yaitu *Murabahah* dan *Musyarakah* termasuk bagaimana cara bank Muamalat Indonesia melakukan analisis pemberian kredit 5C, penetapan persyaratan, dan cara dalam mengatasi kendala-kendala yang ada supaya tidak mengalami permasalahan sebagaimana yang dialami oleh Bank-bank besar tersebut. Pemilihan Bank Muamalat Indonesia ini dikarenakan PT. Bank Muamalat Indonesia, (Tbk). Merupakan bank islam pertama yang ada di Indonesia dengan rekor mampu bertahan dan tetap eksis saat terjadi krisis moneter yang banyak menghancurkan bank-bank konvensional di Indonesia. Pemilihan KPR bank Muamalat ini karena produk KPR nya memiliki keunggulan nilai Margin yang menarik dan cukup terjagkau yakni 9,5% lebih murah jika dibandingkan dengan produk KPR dari Bank BRI Syariah yang sama-sama menggunakan sistem Flat yakni 11,5-12,5%. Selain itu, Peneliti memilih produk KPR dari bank Muamalat Indonesia juga dikarenakan produk ini merupakan produk unggulan dari PT. Bank Muamalat Indonesia[9] dengan menawarkan uang muka yang relative terjagkau yakni mulai dari 10% lebih murah jika dibandingkan dengan penawaran produk serupa dari Bank BTN Syariah yang mematok harga uang muka sebesar 15%.

[9]http://www.bankmuamalat.co.id, diakses pada Kamis, 15 Maret 2021

Berdasarkan latar belakang dan uraian beberapa alasan diatas oleh karenanya, penelitian ini akan dilakukan dengan judul **"Analisis Prosedur dan Sistem Pemberian Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) iB Muamalat (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka berikut dirumuskan beberapa pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pembiayaan yang ditetapkan Bagi Calon Nasabah dalam Pembiayaan KPRS iB Muamalat Bank Muamalat KC Kediri?
2. Bagaimana Penerapan Sistem Analisis Pemberian Kredit 5C *(Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition)* dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) iB Muamalat Bank Muamalat KC Kediri?
3. Bagaimana Bentuk kendala yang terjadi dalam pemberian fasilitas KPRS iB Muamalat Bank Muamalat KC Kediri dan bagaimana pihak bank mengatasi permasalahan yang terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang telah disusun, berikut beberapa tujuan penelitian antara lain:

1. Mendeskripsikan Prosedur Pembiayaan yang ditetapkan Bagi Calon Nasabah dalam Pembiayaan KPRS iB Muamalat Bank Muamalat KC Kediri.
2. Mendeskripsikan Sistem Analisis Pemberian Kredit 5C *(Character, Capacity, Capital. Collateral, Condition)* dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) iB Muamalat Bank Muamalat KC Kediri.
3. Mendeskripsikan Bentuk kendala yang terjadi dalam pemberian fasilitas KPRS iB Muamalat Bank Muamalat KC Kediri dan bagaimana pihak bank mengatasi mengatasi permasalahan yang terjadi.

D. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi Masalah merupakan penjelasan tantang kemungkinan-kemungkinan bahasan yang dapat muncul dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan membahas mengenai analisis sistem dan prosedur pemberian KPR iB Muamalat PT. Bank Muamalat KC Kediri. Pembatasan Masalah dalam penelitian ini sebagaimana latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan yang ada penelitian ini hanya akan

terfokus pada bagaimana prosedur yang ditetapkan dan bagaimana penerapan sistem analisisi pemberian pembiayaan KPR iB Muamalat 5C, dan kendala yang terjadi dalam pemberian pembiayaan juga cara bank mengatasi kendala tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan untuk memperluas pengetahuan dalam sistem dan prosdur pemberian KPRS iB Muamalat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Selain itu juga untuk menambah wawasan mengenai bagaimana Penerapan Sistem dan Prosedur Analisis pemberian Pembiayaan KPRS dalam produk iB Muamalat sehingga bisa mengetahui cara meminimalkan resiko kesalahan dalam pemberian pembiayaan.

b. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan tambahan media pembelajaran bagi mahasiswa yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah dan mengenai Skema KPR iB Muamalat PT. Bank Muamalat Indonesia KC Kediri yang Memberikan gambaran tentang tata cara analisis kredit, pelaksanaan dan cara mengatasi kendala yang terjadi.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk evaluasi dan Inovasi dalam penyelenggaran produk KPRS dalam lembaganya, khususnya dalam penetapan sistem dan prosedur pemberian pembiayaan agar bagaimana bisa berjalan dengan fleksibel dan tentunya memudahkan masyarakat dalam proses pengajuannya.

b. Bagi Pihak lain

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan tambahan media pembelajaran bagi mahasiswa yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah dan mengenai Skema KPRS iB Muamalat yang Memberikan gambaran tentang tatacara Analisis Kredit, pelaksanaan dan cara mengatasi kendala yang terjadi.

Sebagai referensi bagi masyarakat untuk mengetahui produk Kredit Pemilikan Rumah Syariah seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim dengan tinjauan dari kekuarangan dan kelebihan dalam penetapan sistem dan prosedur pemberian pembiayaannya yang akan berdampak pada efisiensi transaksi yang ada.

F. Penegasan Istilah

1. Analisis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)[10] Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis adalah suatu proses dan usaha penyelidikan atau pengamatan pada sesuatu permasalahan atau topik untuk mengetahui suatu kebenaran.

2. Sistem dan Prosedur

Sistem adalah[11] susunan dari komponen-komponen yang berupa data, jaringan kerja prosedur-prosedur yang memiliki keterkaitan, sumber daya manusia, dan teknologi baik yang berupa perangkat keras *(hardware)*, maupun Perangkat lunak (*Software*) yang berhubungan dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan prosedur adalah[12] urutan Jaringan, biasanya melibatkan beberapa orang atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi suatu perusahaan/ kegiatan dalam usaha tersebut yang terjadi berulang-ulang. Kesimpulannya yaitu sistem merupakan susunan dari prosedur-prosedur

---

[10]https://kbbi.web.id/analisis, diakses pada Jumat, 30 Oktober 2020 pukul 09.27

[11]Maniah dan Dini hamidin, *Analisis dan perancangan sistem informasi pembahasan secara praktis dengan contoh kasus,* (CV. Budi Utama: Sleman, 2017), hal. 1

[12]Mirza Maulinarhadi Ranatarizsa dan Max Advian Noor, *Sistem Informasi Akuntansi pada Aplikasi Administrasi Bisnis Cetakan Pertama,* (Malang: UB Press, 2013), hlm. 3-4

berurutan yang harus dipenuhi oleh suatu usaha dalam menjalankan kegiatannya. Sedangkan prosedur sendiri merupakan susunan dari kegiatan yang berurutan dan seragam dalam mewujudkan suatu sistem.

3. Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS)

KPR Syariah adalah[13] produk pembiayaan yang dimiliki perbankan syariah dimana barang (Rumah) ditransaksikan dengan jual beli (*Murabahah)* bukan uang seperti yang ada dalam perbankan konvensional. Pembiayaan ini menyediakan layanan kepada nasabah yang ingin memiliki rumah dengan cicilan atau angsuran.

4. KPR iB Muamalat

KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan guna membantu Nasabah untuk memiliki rumah tinggal/apartemen baru (*indent/ready stock*) maupun *secondary*. Pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk pengalihan *take over* KPR dari bank lain, pembangunan, dan renovasi rumah tinggal. Pembiayaan ini ditujukan bagi perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun untuk karyawan, dan 60 tahun untuk wiraswasta atau profesional pada saat jatuh tempo pembiayaan.

[13]Budi Santoso dan Achmad Adhito, *Jangan Ambil KPR Sekarang Sebelum Membaca Buku Ini*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal. 121

5. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Merupakan bank Syariah pertama yang ada di Indonesia yang dibentuk berdasarkan gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A. [14]

Sejak mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, bank Muamalat sudah melakukan berbagai inovasi produknya yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah dengan mengeluarkan berbagau macam produk pembiayaan, tabungan maupun pelayanan jasa yang salah satunya adalah Produk KPR IB Muamalat. Selain itu, bank Muamalat juga tetap eksis di Industri perbankan sampai saat ini dengan jaringan kantor operasional yang semakin banyak yakni per Desember 2020 sudah

[14]https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat, diakses pada Senin, 1 Maret 2021 Pukul 20.25

memiliki Kantor Cabang sejumlah 80 unit, Kantor Cabang Pembantu sebanyak 145 dan Kantor Kas sebanyak 50 unit yang tersebar diseluruh Indonesia dan salah satunya terletak di Kota Kediri dan dikenal sebagai Bank Muamalat Indonesia KC. Kediri.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, disusun kedalam tiga bagian.yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

   Dalam bagian awal skripsi ini, terdiri dari: Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Lembar Persetujuan, Halaman Pengesahan, Lembar Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Abstrak.

2. Bagian Utama

   Bagian ini terdiri dari:

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan skripsi ini secara garis besar Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup dan Batasan penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan Skripsi. Dalam bab ini Memuat pendapat peneliti mengenai alasan mengapa penelitian dilakukan dengan disertai sajian

data, hal yang akan diteliti atau fokus kajian penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan tujuan dan pemanfaatan penelitian

b. BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini terdiri dari teori dari sumber-sumber literasi membahas yang berkaitan dengan variabel dalam fokus penelitian. Setelah dijelaskan teori terkait penelitian yang berasal dari beberapa literatur, kemudian dibahas teori terkait penelitian yang berasal dari kajian penelitian terdahulu, dan kemudian ini konsep teliti disajikan dalam kerangka konseptual. Pentingnya bab ini yakni sebagai pondasi atau dasar untuk pengukuran pemikiran dalam penelitian, agar penelitian yang dilakukan memiliki dasar yang kuat, akurat, terpercaya dan layak untuk diuji.

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pentingnya bab ini dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan informasi mengenai cara peneliti dalam mencari dan mendapatkan data, sekaligus penjabaran teknik/metode dan prosedur dalam mengolah dan menganalisis data. Secara umum bab ketiga ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, gambaran lokasi penelitian, kehadiran peneliti dalam penelitian, data dan sumber data dalam penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap dalam penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, terdiri dari paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian. Pentingnya bab ke-empat ini, yaitu untuk mengemukakan dan mendeskripsi data yang diperoleh dari hasil penelitian juga proses pengujian data untuk membuktikan atau mencari jawaban atas masalah dalam penelitian.

e. BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini, dijelaskan mengenai deskripsi data penelitian dan hasil analisis data yang sudah dikonfirmasi dan disesuaikan antara temuan penelitian dengan teori-teori yang berhubungan dan di interpretasikan dengan penjelasan yang luas sesuai tema dan batasan penelitian. Selain itu, dari bab ini akan dijelaskan implikasi hasil penelitian terhadap teori-teori baik yang sudah ada maupun yang baru.

f. BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini, berisi ringkasan atas hasil pengujian data dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu juga disajikan saran tau rekomendasi peneliti untuk penelitian yang akan datang.

3. Bagian Akhir

Pada bagaian akhir dalam skripsi ini, terdiri atas daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.